

**SKRIPSI**

**REKONSTRUKSI MODEL *SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK* MENUJU  
*HERDING TREND COMPLIANCE***



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI PUTU MIA WULANDARI  
NIM : 2015654009**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## **REKONSTRUKSI MODEL *SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK* MENUJU *HERDING TREND COMPLIANCE***

Ni Putu Mia Wulandari

2015654009

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

### **ABSTRAK**

Kepatuhan pajak jangka panjang pada tataran sukarela menjadi mimpi besar yang digagas bersama. Perjalanan panjang menggapai kepatuhan pajak melalui sistem pemungutan pajak *Self-Assessment System* belum semulus yang dibayangkan. Wajib pajak memanfaatkan celah kebijakan dengan mematuhi kewajiban sebatas penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut pihak ketiga, akibat dari representasi sosial dan faktor wajib pajak sejawat. Fenomena kepatuhan pajak menghantarkan penelitian ini untuk mempersembahkan model kepatuhan pajak pada tataran ikut-ikutan yang peneliti maknai sebagai “*Herding Trend Compliance*”. Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif dan naturalistik yang melibatkan wajib pajak UMKM sektor restoran Kabupaten Badung dan *practitioners*. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur, namun tetap berpegangan pada pedoman garis besar wawancara. Data yang telah dikumpulkan dari proses wawancara mendalam didukung dengan data dokumentasi dan observasi. Sebagai upaya meningkatkan kualitas data, data yang dikumpulkan ditingkatkan kredibilitasnya dengan teknik triangulasi data. Menghindari bias terhadap data yang akan diuji, maka dilakukan uji transferabilitas pada manuskrip hasil wawancara. Data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang kredibel dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif data *Miles* dan *Huberman* dengan paradigma interpretif. Hasil penelitian menghantarkan pada keputusan perilaku untuk patuh maupun tidak patuh diwarnai oleh perilaku ikut-ikutan atau *herding* yang tercermin dari representasi sosial otoritas pajak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak sejawat. Secara teoritis perilaku wajib pajak diterjemahkan dalam *Fiscal Psychology Model* yang merepresentasikan rendahnya minat wajib pajak untuk patuh. Keputusan patuh ataupun tidak patuh tergambar melalui pertimbangan keputusan dalam *Theory of Planned Behavior*. Melalui rekonstruksi model *Slippery Slope Framework* mampu menggambarkan kondisi kepatuhan pada tataran *herding*. Penelitian ini memiliki kebaruan dari substansi objek dalam mengembangkan model *Slippery Slope Framework*. Kebaruan yang menggiring pada kontribusi secara teoritis dalam mempersembahkan model *extended Slippery Slope Framework* dan pada tataran praktis menjadi alternatif penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang.

**Kata Kunci:** *Herding Trend Compliance, Rekonstruksi Kepatuhan Pajak, Slippery Slope Framework, Wajib Pajak UMKM*

# **RECONSTRUCTION SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK MODEL TOWARDS HERDING TREND COMPLIANCE**

Ni Putu Mia Wulandari  
2015654009

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRACT**

*Long-term tax compliance at the voluntary level is a big dream that is echoed together. The long journey to achieve tax compliance through the Self-Assessment System tax collection system has not been as smooth as imagined. Taxpayers utilize policy loopholes by complying with obligations limited to income withheld and/or collected by third parties, due to social representation and peer taxpayer factors. The phenomenon of tax compliance leads this research to present a model of tax compliance at the follow-the-follow level which researchers interpret as “Herding Trend Compliance”. This research is designed in the form of qualitative research with an interpretive and naturalistic approach involving MSME taxpayers in the Badung Regency restaurant sector and practitioners. Data was collected using an unstructured in-depth interview technique, but still adhering to the interview outline guidelines. Data that has been collected from the in-depth interview process is supported by documentation and observation data. In an effort to improve the quality of the data, the data collected was enhanced for credibility using data triangulation techniques. To avoid bias against the data to be tested, a transferability test was carried out on the manuscript of the interview results. Credible interview, documentation, and observation data were analyzed using Miles and Huberman's interactive data analysis technique with an interpretive paradigm. The results of the study lead to behavioral decisions to comply or not comply colored by herding behavior reflected in the social representation of tax authorities and the fulfillment of peer taxpayer obligations. Theoretically, taxpayer behavior is translated into the Fiscal Psychology Model which represents the low interest of taxpayers to comply. The decision to comply or not comply is reflected through decision considerations in the Theory of Planned Behavior. Through the reconstruction of the Slippery Slope Framework model, it is able to describe compliance conditions at the herding level. This research has novelty from the substance of the object in developing the Slippery Slope Framework model. Novelty that leads to theoretical contributions in presenting the extended Slippery Slope Framework model and at the practical level becomes an alternative policy formulation to improve long-term tax compliance.*

**Keywords:** *Herding Trend Compliance, Tax Compliance Reconstruction, Slippery Slope Framework, MSME Taxpayers*

**REKONSTRUKSI MODEL *SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK* MENUJU  
*HERDING TREND COMPLIANCE***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI PUTU MIA WULANDARI  
NIM : 2015654009**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Mia Wulandari  
NIM : 2015654009  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Rekonstruksi Model *Slippery Slope Framework* Menuju  
*Herding Trend Compliance*  
Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.  
I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.  
Tanggal Uji : 14 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2024



Ni Putu Mia Wulandari



**SKRIPSI**

**REKONSTRUKSI MODEL *SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK* MENUJU  
*HERDING TREND COMPLIANCE***

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NI PUTU MIA WULANDARI  
NIM : 2015654009**

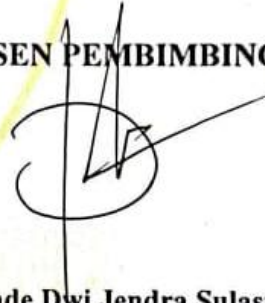
**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.  
NIP 197709142005011002**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.  
NIP 197909112003121002**



**I Made Bagiada., S.E., M.Si., Ak.  
NIP 197512312005011003**

## SKRIPSI

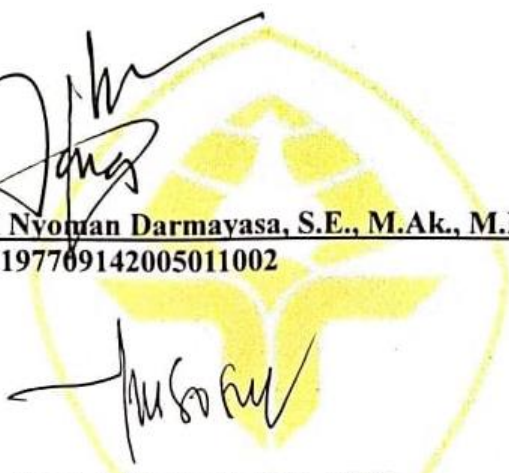
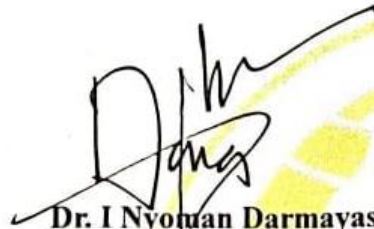
### REKONSTRUKSI MODEL *SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK* MENUJU *HERDING TREND COMPLIANCE*

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024


#### PANITIA PENGUJI

KETUA:

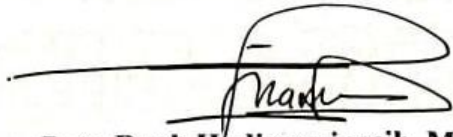


Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.  
NIP 197769142005011002

ANGGOTA:



1. Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M.  
NIP 196602261993032001



2. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum.  
NIP 196303201990112001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Rekonstruksi Model *Slippery Slope Framework Menuju Herding Trend Compliance***” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu memberikan arahan dan melancarkan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, sepenuh hati menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran



serta berbagai motivasi dalam membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berbaik hati menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta motivasi untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staf serta Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali pengampu mata kuliah yang senantiasa telah memberikan jalan serta arahan kepada peneliti hingga peneliti sampai pada penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali yang senantiasa telah mendukung dan memberikan jalan kepada peneliti selama perkuliahan hingga peneliti sampai pada tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia menerima, membimbing dan tentunya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berpartisipasi menyertai peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, adik, serta seluruh keluarga peneliti yang telah memberikan doa restu serta dukungan moral yang menjadi motivator peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa memberikan dukungan, baik secara moral maupun materiel serta motivasi dan doa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk diri sendiri Ni Putu Mia Wulandari selaku peneliti yang telah mengarungi proses manis dan pahitnya suatu perjuangan, untuk sampai di tahap penyusunan skripsi hingga akhir penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari seutuhnya dan sepenuhnya keterbatasan ilmu dan kekurangan peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan dorongan moril berbentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 31 Juli 2024

Ni Putu Mia Wulandari



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Halaman Sampul Depan.....                                | i         |
| Abstrak.....   | ii        |
| <i>Abstract</i> .....                                    | iii       |
| Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....             | iv        |
| Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah ..... | v         |
| Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian .....     | vi        |
| Halaman Penetapan Kelulusan.....                         | vii       |
| Kata Pengantar .....                                     | viii      |
| Daftar Isi .....   | xi        |
| Daftar Tabel .....                                       | xii       |
| Daftar Gambar .....                                      | xiii      |
| Daftar Lampiran .....                                    | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                           | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 6         |
| C. Batasan Masalah.....                                  | 7         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                   | 8         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                       | <b>11</b> |
| A. Kajian Teori.....                                     | 11        |
| B. Kajian Penelitian yang Relevan .....                  | 16        |
| C. Alur Pikir.....                                       | 19        |
| D. Pertanyaan Penelitian .....                           | 23        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                   | <b>24</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                 | 24        |
| B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....               | 25        |
| C. Sumber Data.....                                      | 26        |
| D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....           | 27        |
| E. Keabsahan Data.....                                   | 28        |
| F. Analisis Data .....                                   | 30        |
| <b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>      | <b>32</b> |
| A. Deskripsi Hasil Penelitian .....                      | 32        |
| B. Pembahasan dan Temuan .....                           | 36        |
| C. Keterbatasan Penelitian .....                         | 51        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                               | <b>52</b> |
| A. Simpulan .....  | 52        |
| B. Implikasi.....  | 53        |
| C. Saran.....  | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                               | <b>57</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                     | <b>66</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Rangkuman Kajian Kepatuhan Pajak Berdasarkan Dimensi <i>Power</i> dan <i>Trust</i> ..... | 16 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian .....  | 28 |



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Model <i>Slippery Slope Framework</i> .....   | 15 |
| Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian .....   | 22 |
| Gambar 3.1 Analisis Interaktif Data <i>Miles</i> dan <i>Huberman</i> Paradigma Interpretif       | 31 |
| Gambar 4.1 <i>Extended Slippery Slope Framework</i> Menuju <i>Herding trend Compliance</i> ..... | 50 |





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Hasil wawancara dengan informan Bapak Cafe
- Lampiran 4 : Hasil wawancara dengan informan Ibu Kantin
- Lampiran 5 : Hasil wawancara dengan informan Ibu Kue
- Lampiran 6 : Hasil wawancara dengan informan Bapak Bufet
- Lampiran 7 : Hasil wawancara dengan informan Bapak Aman
- Lampiran 8 : Hasil wawancara dengan informan Bapak Kedai
- Lampiran 9 : Hasil wawancara dengan informan Ibu Resto
- Lampiran 10 : Hasil wawancara dengan informan Bapak Damai



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Memasuki tahun 2023, perekonomian Bali berangsur-angsur pulih ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan ke II mencapai 6,96%. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2022, PDRB tumbuh sebesar 4,84% setelah mengalami keterpurukan pada tahun 2020 sebesar -9,34% dan tahun 2021 sebesar -2,46% (BPS, 2022, 2023d, 2023a). Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama dari 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan pertumbuhan perekonomian yang tumbuh melejit di tahun 2022 mencapai 9,97% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menurun drastis -16,55% dan tahun 2021 -6.74% (BI, 2023; BPS, 2023b).

Pulihnya kantong perekonomian Bali didominasi oleh sektor pariwisata khususnya penyediaan akomodasi dan restoran yang menyumbang 17,93% distribusi PDRB (BPS, 2023c). Uniknya, usaha restoran lebih mampu bertahan dibandingkan usaha penyedia akomodasi penginapan di tengah keterpurukan ekonomi dengan memaksimalkan metode penjualan pesan antar, meningkatkan kerja sama dengan *foodvlogger*, dan *food influencer*. Upaya ini menjadi strategis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) restoran di tengah situasi perekonomian yang redup guna memperluas jangkauan konsumen (Dewi et al., 2022; Hardilawati, 2020; Perdamaian et al., 2020; Priantoko et al., 2021; Raditya, 2022).

Menilik dari sudut pandang perekonomian dan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021, restoran dengan peredaran usaha maksimal 4,8 miliar rupiah tergolong UMKM. Sedangkan dari sudut pandang perpajakan, restoran dengan peredaran usaha maksimal 4,8 miliar rupiah tergolong usaha dengan peredaran tertentu, merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2022, yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2018, yang diganti dengan PP No. 55 Tahun 2022. Wajib pajak sektor restoran dengan peredaran usaha tertentu diberikan kewenangan untuk memilih menghitung kewajiban perpajakan menggunakan mekanisme umum atau memilih menggunakan mekanisme pajak penghasilan final 0,5%. Kebebasan memilih bagi wajib pajak sektor restoran sebagai bentuk implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui sistem pemungutan pajak *Self-Assessment System*.

Penerapan *Self-Assessment System* belum sepenuhnya mampu membentuk wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan jelas sehingga muncul indikasi belum optimalnya pemenuhan kewajiban perpajakan (Monang et al., 2022; Widjaja dan Siagian, 2017). Pada praktiknya, wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan sebenarnya terkait harta, penghasilan, utang, modal, dan pajak terutang melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). SPT disampaikan oleh wajib pajak secara benar, lengkap, dan jelas sehingga, menjadi tolok ukur otoritas pajak dalam mengukur tingkat kepatuhan pajak (Rianty dan Syahputepa, 2020;

Ruky et al., 2018). Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi faktor utama yang menentukan tingkat rasio pajak (*tax ratio*). Namun faktanya, rasio pajak Indonesia tahun 2022 hanya sebesar 10,39%, masih berada di bawah rasio pajak Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) khususnya negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia yang mencapai 12,96% di Singapura dan 11,75% di Malaysia (DJP, 2023; OECD, 2023). Rasio pajak Indonesia triwulan I-2023 berada pada level 11,41%, data ini menunjukkan pertumbuhan rasio pajak setelah tahun 2022, namun perlu ditelusuri lebih lanjut apakah pertumbuhan rasio pajak didominasi oleh wajib pajak UMKM sektor restoran dalam implementasi kepatuhan pajak?

Kepatuhan pajak menjadi topik yang kerap mewarnai dunia penelitian yang telah diteliti lebih lanjut oleh Batrancea et al. (2019), Chong dan Arunachalam (2018), Damayanti dan Supramono (2019), Gangl et al. (2019), Nurkholis et al. (2020), Olsen et al. (2018), Pebrina dan Hidayatulloh (2020), Vionita dan Karina (2022). Kepatuhan bisa timbul dari tekanan rasa ketakutan sebagai konsekuensi dari pengenaan sanksi administrasi bunga, denda, hingga sanksi pidana yang dikenakan kepada wajib pajak, maupun timbul dari rasa kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak yang tercermin melalui proses pemungutan, pembayaran, dan administrasi yang dilakukan oleh otoritas pajak (Deo et al., 2022; Lestari et al., 2023; Slemrod, 2019). Kepatuhan akibat rasa ketakutan mencerminkan kepatuhan paksaan, wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan jika otoritas pajak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa wajib pajak.

Kekuasaan otoritas pajak berupa penerbitan produk hukum Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP), dengan adanya penerbitan produk hukum pajak, otoritas pajak mampu menggali potensi pajak yang hilang. Dilain sisi, otoritas pajak berdedikasi meningkatkan kepatuhan pajak dengan optimalisasi pelayanan sebagai cerminan kepatuhan sukarela. Mengingat wajib pajak yang lebih mengetahui besaran penghasilan yang menjadi dasar kewajiban perpajakannya. Kepatuhan paksaan dan kepatuhan sukarela mewarnai kepatuhan wajib pajak UMKM sektor restoran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Paradigma kepatuhan yang timbul dari dualisme paksaan/sukarela dan tumbuhnya UMKM sebagai penopang perekonomian menjadi perhatian peneliti, mengingat terdapat kecenderungan belum optimalnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, akibat dari UMKM lebih mengutamakan keberlangsungan usahanya di tengah pandemi (Darmayasa, et al., 2022). Namun faktanya, otoritas pajak memberikan insentif pajak kepada UMKM guna meringankan beban pajak yang ditanggung. Pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah bagi sektor UMKM di masa pandemi dinilai efektif mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Riyanti dan Sudarmawanti, 2022).

Mengerucut pada implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak UMKM sektor restoran dilimpahkan kewenangan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan (PPh) terutang atas penghasilan dari usaha, melakukan



pemotongan dan/atau pemungutan, serta penyetoran kewajiban Pajak Hotel dan Restoran (PHR) (Kemenkeu, 2022; Meliandari dan Utomo, 2022; Putri et al., 2019). Pelimpahan kewenangan ini secara tidak langsung memberikan celah kepada wajib pajak UMKM sektor restoran untuk menjalankan kewajiban perpajakan sebatas penghasilan yang telah dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh pihak ketiga. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada wajib pajak UMKM sektor restoran yang murni menyetorkan sendiri PPh terutang, tidak termasuk pemotongan dan/atau pemungutan pihak ketiga dan penyetoran kewajiban PHR.

Bercermin dari urgensi penelitian dan fenomena kepatuhan UMKM sektor restoran yang timbul dari dimensi kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak, peneliti mengemukakan dimensi kepatuhan di luar kepatuhan paksaan dan kepatuhan sukarela. Dimensi yang berkaitan dengan keputusan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh sikap ikut-ikutan yang dikenal dengan istilah “*herding*”. *Herding* mencerminkan perilaku kepatuhan pada tataran *trend*, mengikuti bagaimana kondisi lingkungan dan psikologis wajib pajak pada saat pemenuhan kewajiban perpajakan. Langkah yang diambil peneliti untuk membuktikan apakah *herding* menjadi dimensi baru dalam model *Slippery Slope Framework*, maka penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki 2 (dua) kebaruan dan kontribusi baik aspek teoritis maupun praktis yakni pertama, kebaruan pengembangan model *Slippery Slope Framework* dan kedua, analisis kepatuhan wajib pajak UMKM sektor restoran

setelah diberlakukan PP No. 55 Tahun 2022. Kebaruan dari substansi objek penelitian dengan menganalisis model *Slippery Slope Framework* melalui dimensi kepercayaan (*trust*) dan kekuatan (*power*) dalam membentuk kepatuhan wajib pajak yang diterakan pada wajib pajak UMKM restoran di wilayah Badung pasca pandemi. Peneliti mencoba memberikan sumbangsih pemikiran berupa pengembangan model *Slippery Slope Framework* dengan mempersembahkan model kepatuhan pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 55 Tahun 2022 yang belum optimal digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak UMKM restoran.

Beralih dari kebaruan menuju kontribusi, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Kontribusi teoritis pada pengembangan model *Slippery Slope Framework* beserta *Fiscal Psychology Model* dan *Theory of Planned Behavior* sebagai landasan teori kepatuhan pajak. Mengacu pada pengembangan *Slippery Slope Framework* sesuai konteks wajib pajak UMKM sektor restoran, pada tataran praktis diharapkan menjadi pertimbangan alternatif kebijakan oleh otoritas pajak untuk mengoptimalkan layanan dan memberikan perspektif baru terhadap wajib pajak UMKM restoran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengulas latar belakang yang telah dipaparkan, UMKM sektor restoran menjadi penopang perekonomian di tengah masa pandemi khususnya Kabupaten Badung. Pandemi menghadapkan wajib pajak UMKM pada pilihan psikologi perilaku dalam memilih mengutamakan keberlangsungan usaha atau

memilih memenuhi kewajiban perpajakannya. Pandemi telah usai, menghantarkan wajib pajak UMKM pada tataran era *new normal* dengan tetap menghadapi wajib pajak UMKM pada pilihan meningkatkan laba usaha atau memenuhi kewajiban perpajakan.

Bercermin pada sistem pemungutan pajak *Self-Assessment System*, kewenangan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Namun, fakta tidak dapat dipungkiri bahwasanya wajib pajak UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya sebatas penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak ketiga. Otoritas pajak tidak mampu menjangkau seluruh besaran penghasilan wajib pajak, oleh karena itu muncul kesempatan bagi wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti mempertanyakan kepatuhan wajib pajak UMKM sektor restoran timbul pada tataran paksaan, sukarela atau *trend*.

### C. Batasan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang lebih terfokus pada pokok pembahasan. Mempertimbangkan pelaksanaan *Self-Assessment System*, kepatuhan yang diusulkan dalam penelitian ini dibatasi sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dalam konteks ruang, terkait pemenuhan kewajiban perpajakan sendiri wajib pajak UMKM sektor restoran atas penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak ketiga dan penyeteroran kewajiban PHR. Dalam konteks waktu, peneliti mempertimbangkan

penyesuaian untuk membatasi permasalahan pada wajib pajak UMKM sektor restoran yang beroperasi sebelum tahun 2020 dan tumbuh dari tahun 2020-2023.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih pemikiran peneliti terkait bukti empiris kepatuhan pajak pasca diberlakukannya PP No. 55 Tahun 2022. Penelitian ini menjadi menarik dan relevan mengingat kepatuhan pajak merupakan salah satu tujuan otoritas pajak dalam meningkatkan rasio pajak. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian terkait rekonstruksi model *Slippery Slope Framework* untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak UMKM sektor restoran timbul pada tataran paksaan, sukarela atau *trend*.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat positif dan berguna bagi semua kalangan, adapun manfaat penelitian ini yaitu:

###### **a. Manfaat Teoretis**

Kepatuhan pajak sebagai bentuk implementasi model *Slippery Slope Framework* yang dikonstruksi menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, sudut pandang baru pembentuk perspektif kepatuhan UMKM khususnya sektor restoran, serta memberikan sumbangsih pemikiran berupa pengembangan model *Slippery Slope Framework*. Sehingga

dilakukan penelitian secara empiris terkait pembentuk kepatuhan UMKM pada tataran paksaan, sukarela, atau *trend*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada otoritas pajak berupa pertimbangan alternatif langkah untuk pengambilan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Mengingat kepercayaan menjadi faktor utama yang memengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk patuh. Melalui tulisan ini diberikan beberapa tahapan bagaimana sebaiknya otoritas pajak mencitrakan diri kepada wajib pajak yang akan dibahas dalam pembahasan penelitian ini.

2) Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak berlandaskan *Self-Assessment System* sebagai bentuk kepercayaan otoritas pajak kepada wajib pajak. Seyogyanya wajib pajak memegang kepercayaan tersebut melalui pemenuhan seluruh kewajiban perpajakannya, khususnya, kewajiban yang tidak dipotong dan/atau dipungut oleh pihak ketiga yaitu kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi wajib pajak kepada negara.



### 3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada otoritas pajak dan wajib pajak untuk saling percaya dengan porsi masing-masing terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelayanan pajak dalam bingkai *penta helix*. Langkah nyata sinergi *penta helix* yakni riset vokasi yang didesain dan dilaksanakan oleh akademisi, membutuhkan perspektif dari pemerintah yang membantu industri memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemasaran informasi digital oleh masyarakat sebagai pengguna media sosial. Mengingat, peneliti menjadi bagian dari Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali sebagai lembaga pendidikan vokasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja, mampu berada saing internasional dan hasil penelitiannya bermanfaat bagi masyarakat.

### 4) Bagi Mahasiswa

Hadirnya riset terapan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menuangkan pemikiran kritis terkait fenomena kepatuhan yang terjadi. Sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan vokasi, pengalaman di luar kampus yang dituangkan dalam bentuk riset terapan menjadi salah satu poin penting dalam mencapai IKU 2 perguruan tinggi negeri. Hadirnya riset terapan mengajak mahasiswa secara langsung terlibat dengan masyarakat, pemerintah, industri, dan media.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Sampailah tulisan ini pada benang merah penelitian dengan mempersembahkan *extended Slippery Slope Framework* melalui tambahan dimensi *herding* yang mencerminkan keputusan perilaku wajib pajak untuk patuh ataupun tidak patuh, berkaitan dengan *Fiscal Psychology Model*, *Theory of Planned Behavior*, dan *Slippery Slope Framework*. *Herding* terbentuk dari norma kolektif, dualisme emosional dan rasional, serta makna keadilan kebijakan pajak UMKM, sehingga berlabuh pada *trend compliance*. *Trend compliance* mencerminkan keputusan perilaku wajib pajak atas dasar representasi sosial otoritas pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sejawat.

Berangkat dari norma kolektif yang membentuk karakter wajib pajak, perspektif Ibu Kantin dan Ibu Kue yang dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* dan *Slippery Slope Framework*, menghantarkan pada keputusan untuk patuh timbul dari peran akademisi dan kekuatan otoritas pajak. Tidak dapat dipungkiri, di luar dari faktor pengetahuan perpajakan, faktor emosional dan rasional juga mewarnai pemenuhan kewajiban perpajakan. Pernyataan tersebut tersurat pada perspektif Bapak Cafe dan Bapak Bufet yang mempertanyakan pemenuhan kewajiban otoritas pajak dan alokasi pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak UMKM. Pajak yang disetorkan erat kaitannya dengan keadilan penetapan kebijakan tarif, bercermin dari

perspektif Bapak Damai yang berperan sebagai *practitioners*, keadilan kebijakan tarif pajak UMKM sifatnya hanyalah kesederhanaan. Keadilan kesederhanaan yang mengajak wajib pajak UMKM untuk patuh secara sukarela melalui kemudahan perhitungan pajak terutang. Namun, timbul pertanyaan terkait adanya batas waktu implementasi tarif pajak final 0,5% UMKM yang dilontarkan dari perspektif Bapak Kedai dan Ibu Resto yang berperan sebagai wajib pajak UMKM (usaha menengah). Mengingat, dilain sisi keadilan kesederhanaan ini memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Perspektif informan UMKM yang didukung dengan perspektif informan *practitioners* memperkuat arah penelitian terkait perilaku *herding* dalam pengambilan keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan. Perilaku *herding* yang menggiring keputusan patuh di luar kepatuhan paksaan dan kepatuhan sukarela. Kepatuhan yang timbul dari perilaku *herding* peneliti maknai sebagai kepatuhan yang menuju *trend compliance*.

## **B. Implikasi**

Penelitian ini digagas dan dipersembahkan untuk mengungkapkan fenomena kepatuhan pajak di luar kepatuhan paksaan dan kepatuhan sukarela melalui *trend compliance*. Terungkapnya fenomena *trend compliance* diyakini mampu menjadi solusi dalam menggolongkan kriteria kepatuhan wajib pajak di masa depan. Implikasi penelitian ini dikemas dalam bentuk implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis memuat asumsi dan model dasar pembentuk *herding* sebagai dimensi baru *trend compliance* berdasarkan

*Fiscal Psychology Model, Theory of Planned Behavior, dan Slippery Slope Framework* yang direkonstruksi menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak.

Berangkat dari implikasi teoritis menuju implikasi praktis, yang disajikan menjadi 4 (empat) bagian meliputi otoritas pajak, wajib pajak, akademisi, serta *practitioners*. Pertama implikasi praktis bagi otoritas pajak, sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan strategis perpajakan dan program edukasi pajak yang ditargetkan untuk para wajib pajak. Kedua implikasi bagi wajib pajak, dapat menjadi landasan pemikiran dalam pengambilan keputusan perpajakan sehingga meminimalkan perilaku *herding* negatif. Ketiga, bagi pihak akademisi yang berperan dalam menjembatani hubungan otoritas pajak dengan wajib pajak dalam bentuk edukasi perpajakan, sehingga membuka pola pikir baru untuk mengantarkan wajib pajak pada keputusan *herding* positif. Implikasi terakhir bagi *practitioners*, yakni dalam bentuk kolaborasi bersinergi dengan otoritas pajak dan akademisi dalam memberikan edukasi dan tuntunan *herding positif* menuju *trend compliance*.

### C. Saran

Sampailah tulisan ini pada penghujung akhir penelitian, yang menghantarkan pada saran penelitian kepada beberapa pihak sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang diharapkan dapat mempersembahkan kolaborasi positif bersinergi di masa depan. Berkaitan

dengan implikasi dan tujuan akhir penelitian, peneliti membagi saran kepada 4 (empat) pihak, yang disampaikan secara sistematis sebagai berikut:

#### 1. Otoritas Pajak

Rendahnya minat kepatuhan pajak masih menjadi dilema bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Sebagai pihak pencetus kebijakan, otoritas pajak seyogyanya membangun rasa kepercayaan, sehingga wajib pajak mempercayai segala bentuk kebijakan strategis perpajakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pertimbangan yang pakem dalam mencetuskan kebijakan strategis perpajakan, layaknya model *Slippery Slope Framework* yang mampu menggambarkan kriteria kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Wajib Pajak

Ibarat lakon utama dalam sebuah pementasan drama, wajib pajak menjalankan peranan penting dalam menyukseskan kebijakan strategis perpajakan. Sebagai pihak pelaksana kebijakan, wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui sistem pemungutan pajak *Self-Assessment System* dengan penyerahan kewenangan perpajakan sendiri kepada wajib pajak dan kebijakan strategis fasilitas UMKM, diyakini mampu memberikan kesempatan wajib pajak untuk terus berbenah lebih baik. Dengan bercermin dari program edukasi yang diselengi oleh otoritas pajak, menjadi langkah awal membentuk karakter

wajib pajak yang berpegang teguh terhadap kewajiban perpajakan dan menghindari keputusan *herding* negatif dalam menuju *trend compliance*.

### 3. Politeknik Negeri Bali

Tidak kalah pentingnya dengan lakon utama dalam sebuah drama, akademisi khususnya Politeknik Negeri Bali memegang peranan penting untuk mengajak calon wajib pajak masa depan khususnya generasi muda menjadi generasi yang sadar pajak dan ikut berpartisipasi menyukseskan kebijakan strategis perpajakan. Politeknik Negeri Bali diharapkan tetap berpartisipasi aktif melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Relawan Pajak, dan *Tax Center* yang diyakini menjadi kolaborasi apik dalam mencetak lulusan yang sesuai dengan standarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi negeri.

### 4. Peneliti Selanjutnya

Mengingat kembali keterbatasan penelitian terkait cakupan klasifikasi UMKM yang terbatas pada sektor restoran dan tujuan mulia peneliti, besar harapan ada peneliti selanjutnya yang dapat melakukan pengujian lebih lanjut terkait perilaku *herding*. Penelitian lanjutan yang dikemas menyesuaikan dengan ciri khas peneliti selanjutnya tanpa mengurangi makna kepatuhan pajak. Sehingga mimpi kepatuhan pajak jangka panjang melalui rekonstruksi model *Slippery Slope Framework* dapat terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. *Journal of Public Economics*, 1(3–4). [https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2)
- Ajzen, I. (1987). Attitudes, Traits, and Actions: Dispositional Prediction of Behavior in Personality and Social Psychology. *Advances in Experimental Social Psychology*, 20(C), 1–63. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60411-6](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60411-6)
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Amalia, F. A. (2021). Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 92–101. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020>
- Anggraini, N., & Herianti, E. (2022). Determinan Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Wajib Pajak Pekerja Bebas di Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 113–122. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1201>
- Anggraini, R. Y. (2017). Masuknya Paradigma Interpretif pada Kajian Ilmu Akuntansi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.101>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6, 39–51. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/view/2710/2284>
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Focken, J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassanein, M., Alarcón-García, G., Aldemir, C., Apostol, O., Bank Weinberg, D., Batrancea, I., Belianin, A., ... Zukauskas, S. (2019). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance Across 44 Nation. *Journal of Economic Psychology*, 74, 102191. <https://doi.org/10.1016/J.JOEP.2019.102191>
- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions* 2016, Vol. 7, Page 37, 7(4), 37. <https://doi.org/10.3390/REL7040037>



- BI. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Bali Februari 2023*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Bali%20Februari%202023.pdf>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107>
- BPS. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan-IV 2022*. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/717822/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-iv-2022.html>
- BPS. (2023a). *Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan II- 2023*. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2023/08/07/717824/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-ii-2023.html>
- BPS. (2023b). *Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen), 2020-2022*. <https://bali.bps.go.id/indicator/52/111/1/pertumbuhan-pdrb-ekonomi-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>
- BPS. (2023c). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*. <https://bali.bps.go.id/publication/2023/04/05/343fa37502b500e516ed8203/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-bali-menurut-lapangan-usaha-2018-2022.html>
- BPS. (2023d). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2020-2022*. <https://bali.bps.go.id/publication/2023/10/27/d5a0e4dce21cbbebc9fd1ae4/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-se-provinsi-bali-2020-2022.html>
- Chong, K.-R., & Arunachalam, M. (2018). Determinants of Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence from Malaysia. *In Advances in Taxation*, 147–172. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720180000025007>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Sage Publications Inc. USA.
- da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary Versus Enforced Tax Compliance: The Slippery Slope Framework in the Brazilian Context. *International Review of Economics*, 66(2), 147–180. <https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0>

- Damayanti, T. W., & Supramono. (2019). Trust Reciprocity and Power: An Integration to Create Tax Compliance. *Montenegrin Journal of Economics*, 15(1), 131–139. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2019.15-1.10>
- Darmayasa, I. N., Absari, N. K. M. T. D., & Mandia, I. N. (2021). Nilai Tri Kaya Parisudha sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 129–144. <https://doi.org/doi.org/10.33795/jraam.v5i2.001>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2016). The Role Of Local Wisdom to Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7010>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022a). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2022.11.1.002>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' Perspective on Tax Amnesty Enhances Tax Compliance Dimensions in Extended Slippery Slope Framework. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak pada Moral Pajak, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6045>
- Dewi, N. K. I. M., Sariyani, N. L. P., & Sukarnasih, D. M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Penunjang Kegiatan Pemasaran PT Sacco Indonesia atau Massimo Restaurant Sanur dalam PPKM di Wilayah Bali. *Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK*, 6(1), 35–42. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2022.v6i1.1968>
- DJP. (2023). *Laporan Kinerja DJP 2022: Bersama dalam Semangat Reformasi, Menjadikan Kinerja Unggul sebagai Tradisi*.
- Epstein, G. S., & Gang, I. N. (2024). Herding, Taxpayer's Rent Seeking and Endemic Corruption. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 217, 533–546. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.11.019>

- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley. <https://philarchive.org/archive/FISBAI>
- Gangl, K., Hartl, B., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2019). The Relationship Between Austrian Tax Auditors and Self-Employed Taxpayers: Evidence From a Qualitative Study. *Frontiers in Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01034>
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax Authorities' Interaction with Taxpayers: A Conception of Compliance in Social Dilemmas by Power and Trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending Economic Deterrence and Fiscal Psychology Models in the Design of Responses to Tax Evasion: The New Zealand Experience. *Journal of Economic Psychology*, 12(2), 299–324. [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(91\)90018-O](https://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90018-O)
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax Compliance in a Social Setting: The Influence of Social Norms, Trust in Government, and Perceived Fairness on Taxpayer Compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful Authorities and Trusting Citizens: The Slippery Slope Framework and Tax Compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>
- Kemenkeu. (2022, September 29). *UMKM Mulai Menggeliat Pasca Pandemi Covid 19*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance: Testing the Assumptions of the Slippery Slope Framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010>

- Kogler, C., & Kirchler, E. (2020). Taxpayers' Subjective Concepts of Taxes, Tax Evasion, and Tax Avoidance. In *Ethics and Taxation* (pp. 191–205). Springer Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-0089-3\\_8](https://doi.org/10.1007/978-981-15-0089-3_8)
- Lestari, S., Prastyatini, Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *MODUS*, 35(1), 116–132. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Lewis, A. (1982). The Social Psychology of Taxation. *British Journal of Social Psychology*, 21(2), 151–158. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1982.tb00523.x>
- Mardhiah, M., Miranti, R., & Tanton, R. (2023). The Slippery Slope Framework: A Comprehensive Evaluation of Factors Affecting Trust and Power. *Economic and Political Studies*, 11(3), 382–399. <https://doi.org/10.1080/20954816.2023.2189798>
- Mariganto, D. K., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2023). Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1903–1918. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1494>
- Mas'ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2019). Trust and Power as Predictors to Tax Compliance: Global Evidence. *Economics & Sociology*, 12(2), 192–204. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/11>
- Matthaei, E., Chan, H. F., Schmidt, C., & Torgler, B. (2023). Relative Trust and Tax Morale. *Economic and Political Studies*, 11(3), 400–418. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2157235>
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1862>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications Inc. USA. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Misra, F. (2019). Tax Compliance: Theories, Research Development and Tax Enforcement Models. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.35310/ACCRUALS.V3I2.72>
- Monang, R., Pakpahan, J., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tingkat Pendidikan, Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 3675–3684. <https://doi.org/10.31004/JPDK.V4I4.6047>



- Nik, A., Candra, F., & Novi, D. L. (2023). Insentif Pajak dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Nurkholis, N., Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2020). Tax Evasion and Service-Trust Paradigm: A Meta-Analysis. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1827699. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1827699>
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023*. <https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-5902c320-en.htm>
- Olsen, J., Kasper, M., Enachescu, J., Benk, S., Budak, T., & Kirchler, E. (2018a). Emotions and Tax Compliance Among Small Business Owners: An Experimental Survey. *International Review of Law and Economics*, 56, 42–52. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2018.05.004>
- Olsen, J., Kasper, M., Enachescu, J., Benk, S., Budak, T., & Kirchler, E. (2018b). Emotions and Tax Compliance Among Small Business Owners: An Experimental Survey. *International Review of Law and Economics*, 56, 42–52. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2018.05.004>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Perdamaian, P. D. J., Puspita, A., & Frida, N. (2020). Analisis Strategi Mempertahankan dan Mengembangkan Bisnis di Tengah Pandemi COVID-19 Serta Mengetahui Dampak Perkembangan dan Pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 84–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i3.134>
- PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PP No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Perpajakan.
- Priantoko, A., Anbia, E. F., Wulan, G. M. R., & Panggabean, N. (2021). Tinjauan Penerapan Ekonomi Hijau dalam Pariwisata di Provinsi Bali Review of the Application of Green Economy in Tourism in Bali Province. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1), 16–22. <https://doi.org/10.59141/jist.v2i01.74>

- Primasari, N. H. (2022). Peran Norma dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela dan Paksaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 59–72. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.59-72>
- Prinz, A., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2014). The Slippery Slope Framework on Tax Compliance: An Attempt to Formalization. *Journal of Economic Psychology*, 40, 20–34. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.04.004>
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak dengan Menggunakan Self Assessment System di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 130–136. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Raditya, I. P. T. (2022). Strategi Pemasaran dan Pengembangan Hotel di Nusa Dua Bali Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia*, 6(1), 204–210. <https://doi.org/10.37484/jmph.060122>
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Ritsatos, T. (2014). Tax Evasion and Compliance; from the Neo Classical Paradigm to Behavioural Economics, a Review. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 244–262. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0059>
- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan, dan Kesadaran Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>
- Rizkia, N. D., Jumanah, Sutoyo, M. A. H., Nolia, H., Fakhri, M. M., Bulutoding, L., Huda, N., Mahyuddin, M., Fahmi, A., Sari, R. P., Darmayasa, I. N., Murniati, S., Amruddin, Amalo, F., & Faizal, M. (2022). *Metodologi Penelitian* (S. Bahri, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Rosid, A., & Romadhaniah. (2023). Assessing the Effectiveness of Law Enforcement on Improving Tax Compliance in Indonesia: An Empirical Investigation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 243–267. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1970110>
- Ruky, N. E., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 405–418.

- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., Jonata, Ambarsari, I. F., Azizah, N., Safitri, W., Hasanah, N., Agusti, Gravitiani, E., & Andalia, N. (2022). *Metodologi Penelitian* (A. Yanto, Ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Satyadini, A., & Rosid, A. (2023). Does Tax Simplification Motivate Small Businesses to Be More Compliant? Evidence from a Regression Discontinuity in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2252746>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://pdfs.semanticscholar.org/8a06/614c75d5bef0da64bcae78ca09c4c19795e2.pdf>
- Sholih, M. W., Chariri, A., & Ubaidillah, M. (2020). Religiositas, Keadilan Prosedural, Kepercayaan kepada Otoritas Pajak, dan Kepatuhan Pajak Sukarela. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 1(2). <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4279>
- Shonhadji, N. (2021). Penggunaan Teori Sosial dalam Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.33603/jka.v5i1.3972>
- Slemrod, J. (2019). Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/JEL.20181437>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Vionita, V., & Karina, R. (2022). Analisis Pengaruh Kepercayaan Masyarakat pada Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Dimoderasi oleh Kekuatan Otorisasi Pajak Pemerintah: Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1243–1253. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%203.867>
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in Authorities and Power to Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the “Slippery Slope Framework.” *Law & Policy*, 32(4), 383–406. <https://doi.org/10.1111/J.1467-9930.2010.00327.X>
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System



dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3). <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>

Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran Theory of Planned Behavior dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2019.V3.I2.4082>

Ya'u, A., Saad, N., & Mas'ud, A. (2020). Effects of Economic Deterrence Variables and Royalty Rates on Petroleum Profit Tax Compliance in Nigeria: An Empirical Analysis. *International Journal of Energy Sector Management*, 14(6), 1275–1296. <https://doi.org/10.1108/IJESM-12-2019-0011>

### Rekapitulasi Referensi

| Keterangan        | ≥ 2016    | < 2016    | Total        |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|
| Q1                | 9         | 12        | 21           |
| Q2                | 8         | 1         | 9            |
| Q3                | 2         | 0         | 2            |
| Q4                | 1         | 0         | 1            |
| S1                | 0         | 0         | 0            |
| S2                | 6         | 1         | 7            |
| S3                | 6         | 0         | 6            |
| S4                | 8         | 0         | 8            |
| S5                | 11        | 0         | 11           |
| S6                | 0         | 0         | 0            |
| Buku              | 4         | 0         | 4            |
| Peraturan         | 5         | 0         | 5            |
| DJP/Kemenkeu      | 4         | 0         | 4            |
| OECD              | 1         | 0         | 1            |
| BPS               | 5         | 0         | 5            |
| BI                | 1         | 0         | 1            |
| <b>Total</b>      | <b>71</b> | <b>14</b> | <b>85</b>    |
| <b>Persentase</b> |           |           | <b>83,5%</b> |